

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN



<https://bps.kangselkota.bps.go.id>

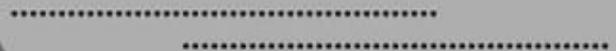
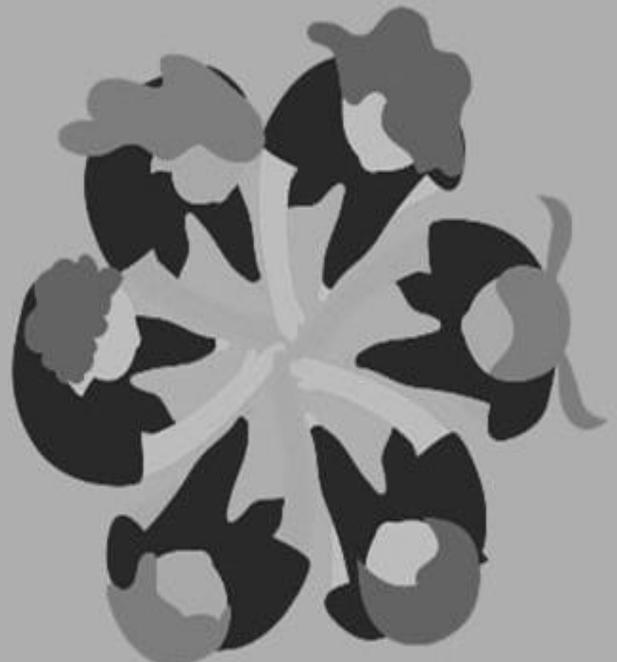


**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANGERANG SELATAN**

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA TANGERANG SELATAN



INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA TANGERANG SELATAN 2021

ISSN/ISBN :
No. Publikasi : 36740.2115
Katalog BPS : 4102004.3674

Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm
Jumlah Halaman : x + 105 Halaman

Naskah : Fungsi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kota Tangerang Selatan

Penyunting : Fungsi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kota Tangerang Selatan

Desain Sampul oleh : Fungsi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kota Tangerang Selatan

Penerbit : @BPS Kota Tangerang Selatan

Pencetak : CV. Namin Makmur Jaya

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

Kata Pengantar

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2021**, merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data dan indikator mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Data dan indikator yang digunakan bersumber dari hasil survei BPS, yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010, serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya sudah tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan tingkat kesejahteraan dikaji menurut tujuh aspek, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta kemiskinan dan ketimpangan.

Diharapkan, publikasi ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Akhirnya, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Tangerang Selatan, Desember 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Tangerang Selatan



Ir. Dadang Ahdiat

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I. Kependudukan	1
Bab II. Kesehatan dan Gizi	15
Bab III. Pendidikan	29
Bab IV. Ketenagakerjaan	45
Bab V. Taraf dan Pola Konsumsi	59
Bab VI. Perumahan	69
Bab VII. Kemiskinan dan Ketimpangan	83
Daftar Pustaka	91

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2016-2020.....	8
Tabel 1.2.	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2017-2020	12
Tabel 1.3.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Tahun 2017-2020.....	13
Tabel 2.1.	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 (Persen)....	19
Tabel 2.2.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020	20
Tabel 2.3.	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui dan Lama Disusui Tahun 2019-2021	23
Tabel 2.4.	Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi Tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021	24
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan Tahun 2017-2020	26
Tabel 2.6.	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2017-2020	27
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Distribusi Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2021....	38
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	39

Tabel 4.1	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus 2019-2020.....	52
Tabel 4.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Agustus 2019-2020	54
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja Agustus 2019-2020.....	56
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2019-2021	64
Tabel 5.2	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Kota Tangerang Selatan Maret 2019-2021	67
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021	73
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021	74
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021	75
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Untuk Minum di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021	78
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021.....	79
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021.....	80
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021.....	81
Tabel 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021.....	88
Tabel 7.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kota Tangerang Selatan Maret 2019-2021.....	90

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Tahun 2016-2021.....	5
Gambar 1.2.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Tahun 2015-2021	6
Gambar 1.3.	Perkembangan Penduduk Usia 65 Tahun ke Atas, Tahun 2016-2021	10
Gambar 2.1.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020	25
Gambar 3.1.	Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2015 dan 2020 (Persen)	33
Gambar 3.2.	Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 (Persen)	34
Gambar 3.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2016-2021 (Persen)	35
Gambar 3.4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021 (Persen)	37
Gambar 3.5.	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020 -2020/2021	41
Gambar 3.6.	Rasio Murid per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020 – 2020/2021	42
Gambar 3.7.	Persentase Guru Berpendidikan Minimal D4/S1 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020 – 2020/2021	43
Gambar 4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018-2021 (Persen)	48
Gambar 4.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin Agustus 2018-2021 (Persen)	49

Gambar 4.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2019-2021 (Persen)	51
Gambar 5.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita Maret 2016-2021	62
Gambar 5.2.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Maret 2019-2021	66
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai Per Kapita Minimal 10 M ² Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021.....	76
Gambar 7.1.	Garis Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021 (Rupiah per Kapita Sebulan)	87

BAB I

KEPENDUDUKAN



<https://tangerangkota.bps.go.id>

I Kependudukan

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut berbagai literatur ekonomi kependudukan, jumlah penduduk yang bertambah banyak akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah ini akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk menjadi semakin berkembang sehingga produktivitasnya akan meningkat. Dengan produktivitas yang meningkat, jumlah produksi akan tumbuh lebih cepat dari penambahan tenaga kerja.

Dampak positif lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, bersumber dari penambahan luas pasar. Dimana, besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, salah satunya bergantung kepada jumlah penduduk. Apabila penduduk bertambah, dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Oleh karena itu, perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada penambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar memerlukan kebutuhan hidup yang besar pula. Bila terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup, akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan resiko meningkatnya jumlah kematian penduduk. Ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi, mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak.

Masalah lain yang dapat muncul, adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas yang dipicu oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia karena sarana pendidikan yang terbatas.

Selain jumlah penduduk yang besar, ketimpangan komposisi dan sebaran penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, harus dipilah sedemikian rupa sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

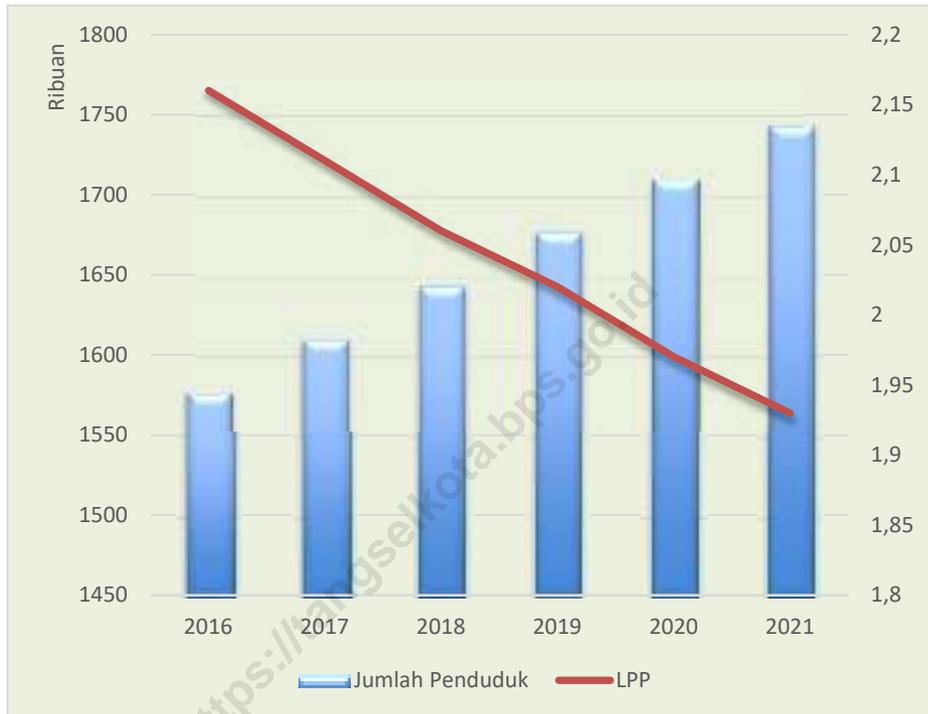
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut SUPAS 2015, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 mencapai 1.743.461 juta jiwa. Berarti, Kota Tangerang Selatan menjadi kabupaten/kota dengan populasi terbanyak ketiga di Provinsi Banten, setelah Kabupaten Tangerang (3,85 juta), dan Kota Tangerang (2,27 juta).

Laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan, terus mengalami perlambatan dari tahun 2016 hingga 2021 (Gambar 1.1). Namun demikian, kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan sebesar 10.828 jiwa per km².

Tingginya tingkat kepadatan penduduk, tentunya menimbulkan persoalan tersendiri bagi Kota Tangerang Selatan. Hal ini karena dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan, akan semakin banyak lagi yang perlu dipertimbangkan. Khususnya, dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

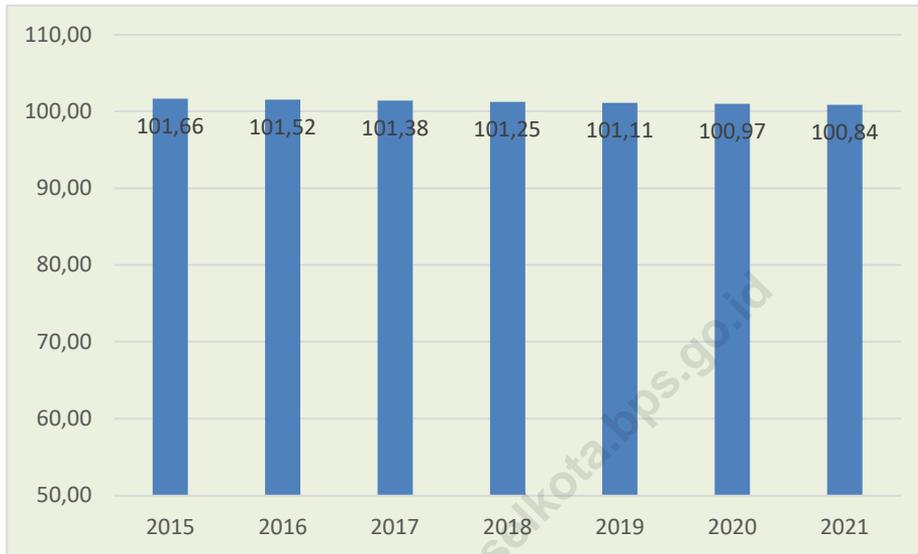
Gambar 1.1.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2016-2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2015-2025 (data diolah)

Betapapun juga, tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah secara teoritis dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni fertilitas, mortalitas dan migrasi. Akan tetapi, faktor yang paling dominan bagi tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan adalah migrasi. Migrasi menjadi faktor dominan karena Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah tujuan migrasi utama di Indonesia, akibat perannya sebagai daerah *hinterland* bagi DKI Jakarta.

Gambar 1.2.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Tahun 2015 -2021

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025 (data diolah)

Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) menjadi salah satu indikator kependudukan yang layak untuk dicermati. Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Tangerang Selatan terus mengalami penurunan, meskipun besarnya masih tetap di atas 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 mencapai 100,84. Dengan kata lain, ada sekitar 101 orang penduduk laki-laki untuk setiap 100 orang penduduk perempuan.

Sementara itu turunnya rasio jenis kelamin ini menjadi penanda bahwa proporsi penduduk laki-laki dalam struktur penduduk Kota Tangerang Selatan telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, kemungkinan adalah berkurangnya jumlah bayi laki-laki yang dilahirkan, seperti yang sebelumnya sudah terjadi di negara-negara maju.

Menurut para peneliti dari Universitas Exeter dan Universitas Oxford, gaya hidup modern dengan pola makan rendah kalori, dapat menjelaskan mengapa jumlah bayi laki-laki yang lahir di negara-negara maju menjadi berkurang. Hal ini karena tingginya kadar kalori yang dikonsumsi oleh wanita yang sedang berusaha untuk hamil, akan lebih meningkatkan peluang mereka dalam melahirkan anak laki-laki (BBC Indonesia, 2008).

Di sisi lain, menurunnya proporsi penduduk laki-laki, secara teori juga disebabkan oleh lebih banyaknya laki-laki yang meninggal setiap tahun, dibandingkan perempuan. Penurunannya ini sejalan dengan meningkatnya kelompok umur penduduk. Oleh karena itu, semakin tua usia kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki akan semakin berkurang. Bahkan, pada usia dewasa (40 – 54 tahun), usia tua (55 – 64 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas), jumlah perempuan cenderung lebih banyak daripada laki-laki.

Dalam banyak literatur juga ditemukan bahwa naik atau turunnya proporsi penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin, berkaitan erat dengan fenomena migrasi. Dalam arti, daerah tujuan migrasi yang memerlukan banyak tenaga kerja laki-laki, seperti di daerah pertambangan, rasio jenis kelaminnya akan meningkat dan dengan besaran tetap di atas 100. Sementara daerah yang ditinggalkan pergi merantau oleh para laki-laki, rasio jenis kelaminnya akan menurun dan bahkan cenderung berada di bawah 100.

Angka Beban Ketergantungan dan Bonus Demografi

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator kependudukan yang penting, karena dapat menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Semakin besar angkanya, menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun), dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sebaliknya bila semakin kecil, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan terlihat didominasi oleh penduduk usia produktif. Bahkan, persentasenya juga terus meningkat hingga menjadi 73,14 persen pada tahun 2021 (Tabel 1.2). Dengan demikian, Kota Tangerang Selatan memiliki penduduk usia produktif yang cukup banyak dan sangat potensial untuk digunakan sebagai modal dasar dalam membangun daerahnya.

Tabel 1.1.

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Angka Beban Ketergantungan
Tahun 2016-2020

Tahun	Komposisi Penduduk (Persen)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	23,94	72,71	3,35	37,53
2017	23,61	72,85	3,54	37,26
2018	23,29	72,97	3,74	37,05
2019	22,98	73,05	3,97	36,89
2020	22,68	73,11	4,21	36,78
2021	22,40	73,14	4,46	36,72

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025 (data diolah)

Sementara itu persentase penduduk usia 0-14 tahun dapat dikatakan cukup tinggi, walaupun besarnya terus menurun. Penurunannya juga dapat menjadi penanda bagi keberhasilan dari upaya pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun meningkatnya persentase penduduk usia 65 tahun ke atas, menjadi salah satu bukti adanya perbaikan dalam bidang

kesehatan, sehingga penduduk dapat hidup lebih lama.

Adanya perubahan komposisi penduduk di atas, jelas sangat mempengaruhi besarnya angka beban ketergantungan. Pada tahun 2016, angka beban ketergantungan Kota Tangerang Selatan sebesar 37,53. Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 37 sampai 38 orang penduduk usia tidak produktif. Sementara pada tahun 2021, beban yang ditanggung sedikit mengalami penurunan, sehingga yang ditanggung sekitar 36 sampai 37 orang penduduk usia tidak produktif.

Melihat besaran angka beban ketergantungan yang kurang dari 50 ini, dapat dikatakan bahwa Kota Tangerang Selatan sudah mengalami bonus demografi (*demographic dividend*). Bahkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk, bonus demografi sudah diraih sejak tahun 2016. Bonus demografi tersebut juga masih akan dinikmati, setidaknya hingga tahun 2035 (BPS, 2013a).

Bonus demografi adalah suatu fenomena, dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Hal ini karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut masih belum banyak. Bonus demografi mulai dinikmati bila angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan hingga menjadi di bawah 50.

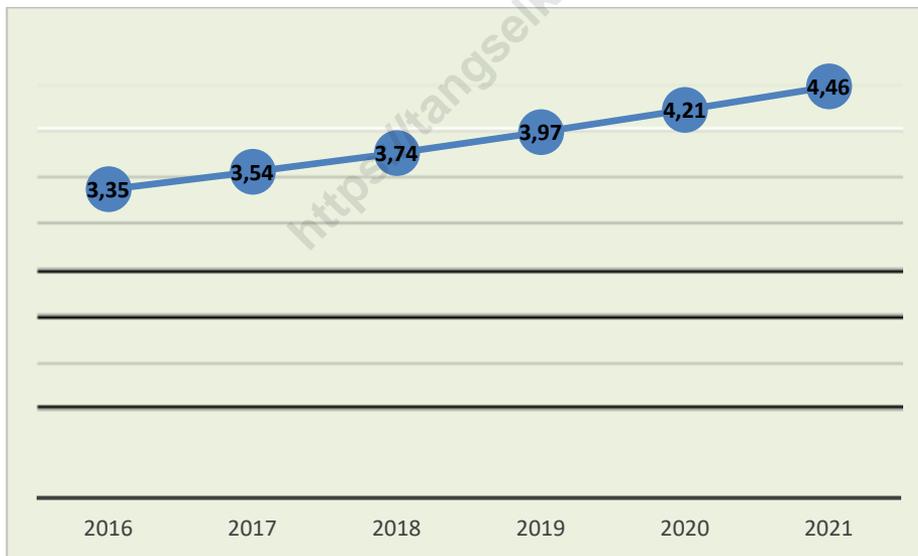
Walaupun sudah lama meraihnya, namun bonus demografi belum tentu bermanfaat bagi Kota Tangerang Selatan. Untuk benar-benar bisa menikmatinya, kualitas sumber daya manusia Kota Tangerang Selatan harus terus-menerus ditingkatkan. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja juga mesti ditambah, agar dapat menampung banyaknya penduduk usia produktif.

Setelah bonus demografi, penuaan penduduk (*ageing population*) sepertinya akan menjadi isu penting pada masa-masa mendatang. Penuaan penduduk adalah suatu fenomena demografi, yang akan terjadi ketika umur median penduduk meningkat akibat naiknya angka harapan hidup dan atau

menurunnya tingkat fertilitas.

Penuaan penduduk salah satunya dapat diukur melalui proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas. Disebut mengalami penuaan, apabila persentasenya sudah di atas 7 persen. Betapapun juga, bila bonus demografi benar-benar berhasil dinikmati, Kota Tangerang Selatan akan mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua ini adalah suatu kondisi, dimana proporsi penduduk yang berusia tua semakin banyak namun masih produktif, sehingga tetap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negara.

Gambar 1.3.
Perkembangan Penduduk Usia 65 Tahun ke Atas
Tahun 2016-2021



Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama, khususnya bagi penduduk perempuan. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi, sehingga memperbesar peluang untuk melahirkan anak dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

Perkawinan pada usia dini marak terjadi, karena faktor rendahnya tingkat pendidikan antar kedua pasangan, tuntutan ekonomi, sistem nilai budaya, pernikahan yang sudah diatur atau perjodohan, dan bahkan seks bebas.

Perkawinan pada usia dini akan meningkatkan resiko kematian bagi anak yang dilahirkan serta dapat menurunkan kesehatan reproduksi bagi ibu yang melahirkannya. Beban ekonomi yang muncul, juga semakin bertambah berat. Selain itu, akan meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian, dan bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, perkawinan usia dini lebih banyak merugikan, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya.

Terkait usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun, undang-undang ini ternyata masih membuka peluang bagi terjadinya pernikahan dengan usia yang lebih dini lagi. Caranya adalah dengan meminta dispensasi kepada pengadilan, jika usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia yang telah ditetapkan.

Adapun BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merekomendasikan batas minimal usia perkawinan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Alasannya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita serta 25-30 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam

mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga tercipta hubungan yang berkualitas (Putri, 2017).

Tabel 1.2.

Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2017-2020

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤16	7,65	6,84	7,94	7,44
17-18	13,1	11,83	13,57	15,12
19-20	19,41	21,28	18,93	20,02
21+	59,85	60,06	59,56	57,42

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2017-2020

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 50 persen perempuan di Kota Tangerang Selatan melakukan perkawinan pertama pada usia yang ideal, yakni minimal 21 tahun. Dimana, persentasenya pada tahun 2020 mencapai 57,42 persen.

Hanya saja, masih ditemukan perempuan berusia kurang dari 18 tahun yang sudah menikah, padahal mereka masih dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, mereka yang menikah saat berusia maksimal 16 tahun juga cukup banyak, yakni sebesar 7,44 persen (Tabel 1.4).

Penggunaan Alat/Cara KB

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari peranan pemerintah. Salah

satunya melalui program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi kelahiran anak dan angka kematian ibu. Program KB ini dilaksanakan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau alat KB, yang beragam jenis dan macamnya.

Tabel 1.3.

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin
Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan
Tahun 2017-2020

Alat/Cara Kontrasepsi	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Wanita yang sedang Menggunakan Alat/Cara KB	53,19	44,18	48,59	47,92
MOW/Tubektomi	6,89	2,91	4,84	6,09
MOP/Vasektomi	0,39	0,66	1,54	0,00
AKDR/IUD/Spiral	18,76	14,37	10,61	11,9
Suntikan KB	47,02	40,99	53,94	56,04
Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit	1,95	3,40	2,53	3,85
Pil KB	18,43	26,70	21,05	17,52
Kondom Pria/Karet KB	2,86	10,30	2,66	4,11
Intravag/Tisu/Kondom Wanita	0,03	0,00	0,00	0,00
Metode Menyusui Alami	0,59	0,00	0,00	0,00
Pantang Berkala/Kalender	2,45	0,26	2,84	0,48
Lainnya	0,62	0,42	0,00	0,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2017-2020

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017-2020 (Tabel 1.5), persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB terlihat mengalami penurunan. Oleh sebab itu, penurunannya ini harus dicermati dan dicarikan jalan keluar agar pada tahun-tahun selanjutnya tidak menurun lagi.

Banyak ragam atau jenis alat/cara KB. Pasangan usia subur bebas memilih alat/cara KB yang diinginkan dan dirasakan nyaman bagi diri dan pasangannya. Namun, yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB di seluruh daerah tempat tinggal adalah Suntikan KB dan Pil KB.

Suntikan KB merupakan salah satu alat/cara KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Tingkat efektivitasnya menurut berbagai penelitian lebih rendah dibandingkan metode MKJP lainnya, yakni IUD dan Implant. Suntikan KB banyak dipilih karena dirasakan cukup efektif, praktis dan harganya lebih murah. Selain itu, ada ketakutan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh akseptor KB bila menggunakan IUD atau Implant.

Sementara itu Pil KB menjadi salah satu alat/cara KB metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP). Tingkat efektivitasnya memang lebih rendah dari alat KB metode MKJP, karena menuntut adanya kedisiplinan dari akseptor KB. Pil KB banyak dipilih karena penggunaannya lebih mudah dan praktis dibandingkan alat KB metode MKJP. Selain itu, harganya jelas lebih murah dan juga lebih nyaman digunakan daripada alat KB Non MKJP lain, yaitu Kondom Pria/Karet KB dan Intravag/Tisu/Kondom Wanita.

Untuk menjamin keberhasilan program KB, alat kontrasepsi yang lebih tepat digunakan adalah IUD dan Implant. Namun, persentase implan pada tahun 2020 masih sangat rendah, yaitu 3,85 persen dari seluruh Akseptor KB. Oleh karena itu, BKBBN harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan cakupan penggunaan IUD dan Implant. Lebih-lebih, masih ada pasangan usia subur yang menggunakan cara tradisional dalam ber-KB, dengan persentase mencapai 0,48 persen.

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI





Kesehatan dan Gizi

Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat merupakan indikator penting dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi wilayah tersebut, khususnya dalam meningkatkan produktivitas penduduk.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dalam hal ini, derajat kesehatan masyarakat akan ditingkatkan melalui program peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sasaran dan tujuan dari berbagai program bidang kesehatan di atas adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan umur harapan hidup.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Pemerintah melalui program-program bidang kesehatan, antara lain adalah menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara lebih merata, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan status rumah sakit daerah, meningkatkan cakupan dan mutu puskesmas/pustu, polindes dan posyandu, serta meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang merupakan satu kesatuan, bukan hanya terbebas dari penyakit maupun cacat. Sejalan dengan definisi tersebut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan warga negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau penduduk yang setinggi-tingginya.

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah status kesehatan. Status kesehatan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk menjadi satu dari beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan.

Angka kesakitan (*morbidity rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil Susenas 2021 seperti yang disajikan pada Tabel 2.1, angka kesakitan penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 7,47 persen, atau menurun dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini menjadi penanda bahwa status kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.

Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2021 (Persen)

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	10,95	6,96	7,75	10,16	4,16
Perempuan	14,19	8,69	8,89	10,53	10,78
Total	12,57	7,83	8,32	10,34	7,47

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017-2021

Dari sisi jenis kelamin, angka kesakitan perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Ada kemungkinan hal ini disebabkan oleh ketahanan tubuh laki-laki yang relatif lebih baik.

Sementara itu umur harapan hidup yang merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat, adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Secara teori, semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kesehatannya maka umur kehidupan orang tersebut akan semakin pendek.

Ada keterkaitan antara umur harapan hidup dan mortalitas. Saat mortalitas rendah, umur harapan hidup akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Mortalitas sendiri adalah ukuran jumlah kematian yang terjadi pada suatu populasi. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mortalitas ini, antara lain yaitu penyakit, tingkat kriminalitas yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Umur harapan hidup (UHH) penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 telah mencapai 72,47 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun

2019 (Tabel 2.2). Kondisi yang demikian menjadi penanda bagi meningkatnya derajat kesehatan, sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa perempuan memiliki UHH yang lebih tinggi. Berarti, secara rata-rata perempuan hidup lebih lama dari laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah karena perempuan lebih kuat menghadapi penyakit jantung. Sementara kecenderungan perkembangan penyakit jantung dan risiko meninggal karena penyakit ini, paling cepat pada usia 30-an dan 40-an dimiliki oleh laki-laki. Adapun untuk perempuan, perkembangannya membutuhkan waktu 10 tahun lebih lama (BPS Provinsi Banten, 2020b).

Tabel 2.2.

Perkembangan Umur Harapan Hidup
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup				
a. Laki-laki	70,17	70,27	70,43	70,51
b. Perempuan	74,09	74,19	74,27	74,31
c. Laki-laki dan Perempuan	72,16	72,26	72,41	72,47

Sumber : BPS

Selain harapan hidup yang panjang, peningkatan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat juga harus tercermin dari menurunnya tingkat kematian. Sementara itu tingginya umur harapan hidup perempuan, sudah seharusnya didukung oleh rendahnya tingkat mortalitas penduduk perempuan.

Adapun relatif lebih rendahnya umur harapan hidup laki-laki, harus ditopang oleh tingkat mortalitas yang lebih tinggi dari laki-laki.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan pertama bayi yang paling berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat jangka panjang yang sangat baik, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, serta mengandung protein dan gizi yang berkualitas tinggi. ASI juga mengandung zat antibodi yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare, serta penyakit infeksi dan penyakit lainnya.

Demikian pentingnya pemberian ASI bagi bayi, sehingga *World Health Organizations* (WHO), merekomendasikan kegiatan berupa proses inisiasi menyusui dini. Kegiatan ini lebih dikenal sebagai Program Inisiasi Menyusui Dini (PIMD), yang dijalankan selama satu jam pertama kehidupan awal bayi. Proses inisiasi tersebut dilakukan dengan cara menempatkan bayi di dada ibunya, segera setelah bayi keluar dari jalan lahir. Bayi ini kemudian akan secara alami, mencari puting ibunya untuk menghisap ASI.

Banyak sekali manfaat yang didapat dari proses IMD ini. Di antaranya adalah memberikan peluang kepada bayi untuk mendapatkan kolostrum, membuat bayi menjadi tenang, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh bayi, lebih menstabilkan napas bayi, dan menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif, serta membantu ibu untuk pulih lebih cepat.

Disamping itu, bukti menunjukkan bahwa kulit bayi yang bersentuhan langsung dengan kulit ibunya, segera setelah lahir ke dunia, dapat membangun keintiman yang lebih dalam dengan sang ibu. Proses ini juga membantu bayi tetap merasa hangat setelah keluar dari rahim (Alodokter, 2018).

Sementara itu menurut Septiaputri (2018), kolostrum adalah air susu pertama yang dikeluarkan payudara pada masa kehamilan. Kolostrum sangat cocok untuk makanan pertama bayi karena sangat mudah dicerna. Beberapa manfaat kolostrum adalah:

- Dapat mencegah infeksi pada bayi. Kolostrum kaya akan sel darah putih yang melawan infeksi bakteri dan virus. Bayi yang diberi kolostrum tidak rentan terkena pneumonia, bronkitis, flu, infeksi perut, dan penyakit infeksi lainnya.
- Mencegah bayi kuning pasca persalinan. Kolostrum membantu tubuh dalam mengurangi bilirubin, sehingga bayi tidak mengalami ikterus atau penyakit kuning.
- Membantu perkembangan organ pencernaan bayi. Kolostrum bermanfaat untuk mempersiapkan sistem pencernaan agar dapat mencerna susu matang yang diproduksi payudara Anda nantinya.

Selain PIMD, pemerintah juga menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Setelah bayi berusia 6 bulan ke atas, baru dilanjutkan bersama makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun, agar diperoleh kekebalan yang lebih kuat.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.3, diketahui bahwa anak berusia kurang dari 2 tahun di Kota Tangerang Selatan yang pernah disusui sebanyak 88,84 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2020, yang mencapai 96,76 persen. Sementara itu, rata-rata lama disusunya juga menurun dari 10,2 bulan menjadi 9,9 bulan. Menurunnya baduta yang pernah disusui dimungkinkan karena semakin meningkatnya partisipasi kerja perempuan. Perempuan yang bekerja jelas mempunyai waktu luang yang lebih sedikit, sehingga rata-rata lama anak disusunya menjadi lebih rendah.

Tabel 2.3.

Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui dan Lama Disusui
Tahun 2019, 2020 dan 2021

Keterangan		Persentase yang Pernah Disusui			Rata-rata Lama Disusui (Bulan)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin	Laki-laki	95,13	93,66	86,57	10,36	11,63	9,68
	Perempuan	97,32	98,96	90,74	9,6	9,24	10,08
Distribusi pengeluaran perkapita per bulan	40 Persen Terbawah	97,27	98,24	97,68	10	11,18	9,92
	40 Persen Tengah	93,57	92,45	80,24	9	8,33	10,11
	20 Persen Teratas	100,00	100,00	75,51	12	10,22	9,41
Pendidikan Tertinggi KRT	SD ke bawah	100,00	96,04	96,27	6	9,05	11,50
	SMP ke atas	95,62	96,96	87,57	11	10,51	9,60
	Total	96,17	96,76	88,84	9,99	10,2	9,90

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019, 2020 dan 2021

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan dan daya tahan tubuh balita. Ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi pasif dan aktif. Imunisasi pasif merupakan kekebalan bawaan yang diperoleh anak sejak lahir, sedangkan imunisasi aktif didapat dari pemberian vaksin kepada anak, melalui suntik atau tetes.

Tabel 2.4.

Persentase Balita (Usia 0-59 Bulan) yang Pernah Diimunisasi
Menurut Jenis Imunisasi
Tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021

Jenis Imunisasi	Laki-laki & Perempuan			
	2017	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pernah Diimunisasi Lengkap	44,79	39,8	55,09	62,04
BCG	89,6	93,31	93,64	89,09
DPT	88,84	90,49	87,19	83,42
Polio	91,25	92,71	91,73	88,58
Campak/Morbili	65,94	76,92	70,55	73,92
Hepatitis B	87,11	91,43	87,12	83,66

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017, 2019, 2020 dan 2021

Terkait imunisasi aktif, hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa balita di Kota Tangerang Selatan yang mendapat imunisasi lengkap mengalami kenaikan. Sebanyak 62,04 persen balita di Kota Tangerang Selatan mendapat imunisasi lengkap.

Untuk memperoleh kekebalan yang cukup, seorang anak harus mendapatkan imunisasi lengkap. Yang dimaksud dengan imunisasi lengkap adalah anak yang telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Tingkat kesakitan atau morbiditas sendiri dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Adapun keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menjadi penyebab terganggunya aktivitas atau kegiatan sehari-hari.

Gambar 2.1.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2020



Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017-2020 (data diolah)

Sayangnya, meskipun mengalami keluhan kesehatan, tidak semua penduduk secara serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan, yang hanya sekitar 56 persen pada tahun 2020. Betapapun juga, angka berobat jalan ini sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 54 persen (Gambar 2.2).

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya persentase penduduk yang berobat jalan, dalam hal ini memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan. Beberapa di antaranya adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kondisi sosial-ekonomi penduduk atau kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, dan jenis pelayanan kesehatan serta preferensi penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.5.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan
Tahun 2017-2020

Fasilitas Layanan Kesehatan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit Pemerintah	10,43	8,3	9,52	9,71
Rumah Sakit Swasta	27,57	23,35	20,87	19,62
Praktek Dokter/Bidan	13,95	15,08	10,02	10,37
Klinik/Praktek Dokter Bersama	30,13	24,07	36,25	37,41
Puskesmas/Pustu	24,27	28,03	32,66	26,93
Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya	0,85	0,97	0	0
Praktek Pengobatan Tradisional	1,36	5,3	0,58	0,6
Lainnya	0,79	1,67	2,2	0,29

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017-2020

Bila diamati menurut fasilitas kesehatan, sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ternyata lebih memilih klinik/praktek dokter bersama, sebagai tempat berobat jalan (Tabel 2.5). Penyebabnya, terutama

karena fasilitas kesehatan tersebut sudah semakin banyak tersedia di seluruh daerah tempat tinggal. Selain itu, kenaikan persentasenya bersama kenaikan persentase pengguna rumah sakit, juga menjadi penanda semakin mudahnya penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang lebih berkualitas. Ada kemungkinan, hal ini dapat terjadi karena semakin meningkatnya cakupan peserta BPJS.

Tabel 2.6.

Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2017-2020

Penolong Persalinan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter Kandungan	59,91	51,23	63,4	57,99
Dokter Umum	1,93	2,97	5,89	3,41
Bidan	36,91	45,8	30,71	35,43
Perawat	0	0	0	3,17
Dukun beranak/paraji	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017-2020

Selain untuk berobat jalan, fasilitas dan tenaga kesehatan juga digunakan untuk membantu proses kelahiran. Proses kelahiran dinyatakan aman dan memenuhi syarat kesehatan, jika sejak awal hingga akhir proses, ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih atau tenaga terlatih lainnya di bidang persalinan. Bila tidak ditangani oleh tenaga terlatih, dikhawatirkan tingkat keamanan dan kesehatannya menjadi tidak terjamin. Oleh karena itu, salah

satu faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus kematian bayi adalah penanganan atau penolong kelahiran yang ditangani oleh tenaga non medis tidak terlatih.

Hasil Susenas 2017-2020 (Tabel 2.6), memperlihatkan bahwa sebagian besar proses persalinan penduduk Kota Tangerang Selatan ditangani oleh dokter kandungan. Hal ini dimungkinkan masyarakat merasa lebih aman apabila persalinan ditangani oleh dokter karena memiliki tingkat keamanan dan kesehatan persalinan paling tinggi.

<https://tangselkota.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN





Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya, serta dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, dengan pendidikan yang dimilikinya, seseorang diharapkan akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan ini, maka pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan harus mencakup peningkatan pendidikan formal dan non formal. Pembangunan bidang pendidikan juga memerlukan peran serta aktif dari semua pihak, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tujuan pembangunan bidang pendidikan sendiri adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Meningkatnya akses terhadap pendidikan ini, antara lain ditandai oleh naiknya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Implikasinya, ketersediaan sekolah atau kelas dan kemudahan untuk mengaksesnya, mutlak diperlukan bagi peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut.

Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan. Dalam hal ini, salah satu yang terpenting adalah ketersediaan tenaga pendidik yang mencukupi dan berkualitas. Ketersediaan tenaga pendidik yang

mencukupi dapat diketahui dari indikator rasio murid-guru dan rasio murid per kelas. Adapun tenaga pendidik berkualitas setidaknya dapat dilihat dari tingginya kualitas guru yang mengajar.

Angka Melek Huruf

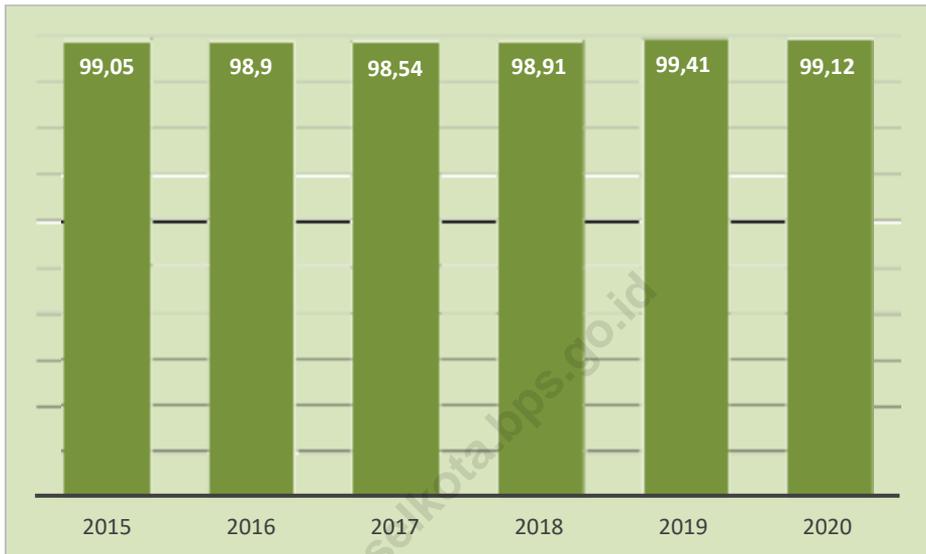
Melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Lebih detail lagi adalah konsep dari UNESCO, yang menyatakan bahwa melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Sementara itu Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis, serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH sangat berkaitan erat dengan Angka Buta Huruf (ABH). Semakin tinggi AMH, menunjukkan semakin rendahnya ABH. Baik AMH maupun ABH, dapat digunakan untuk melihat capaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf, sebenarnya sudah berjalan sejak jaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut. Bahkan dalam sejarahnya, Indonesia pernah memproklamkan telah bebas buta huruf. Namun karena tidak dipergunakan, membuat banyak orang yang sudah melek huruf kembali menjadi buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis huruf latin, kemampuan berhitung, serta berketerampilan. Dengan kemampuan tersebut, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih baik, sehingga dapat memecahkan persoalan sehari-hari. Selain itu, juga untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang potensial, agar mampu mengelola sumber daya di lingkungannya.

Gambar 3.1.

Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas
Tahun 2015-2020 (Persen)

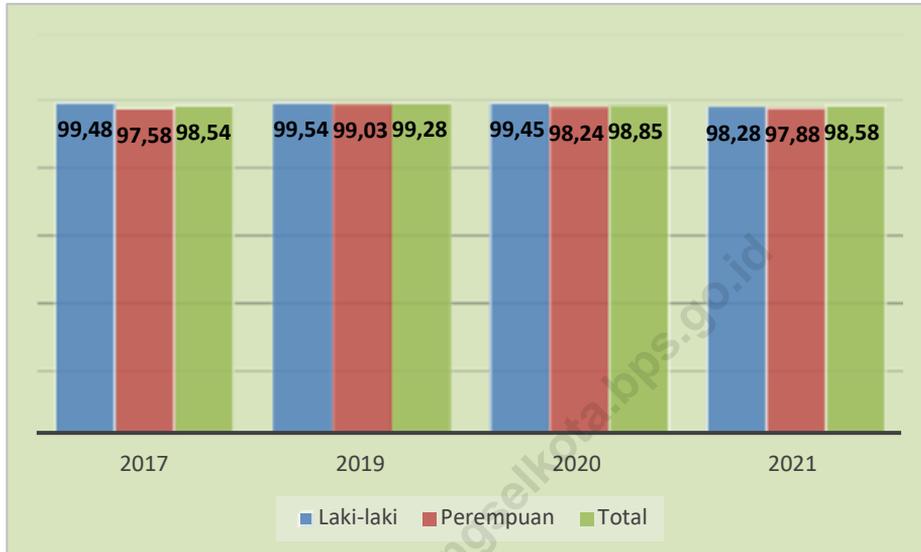
Sumber : BPS, Susenas

AMH Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,12 persen. Selama dua tahun terakhir AMH Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Gambar 3.1). Meskipun sedikit, namun peningkatannya itu menunjukkan bahwa angka buta huruf masyarakat telah mengalami penurunan. Implikasinya, kualitas SDM Kota Tangerang Selatan dari sisi pendidikan sudah meningkat, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis.

Kemampuan membaca dan menulis huruf latin di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup bagus. Pada tahun 2021, sebanyak 98,58 persen penduduk usia 15 tahun ke atas mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin.

Gambar 3.2.

Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2017-2021 (data diolah)

Diamati menurut jenis kelamin, kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota Tangerang Selatan, lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Pada tahun 2021, terdapat 98,28 persen penduduk laki-laki yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Nilai ini berada di bawah 100 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat kasus buta huruf di Kota Tangerang Selatan, dan yang terbanyak justru menghinggapi kaum perempuan.

Terkait perempuan yang buta huruf, menurut Kusnadi dalam Statistik Pendidikan 2012 (BPS, 2013b), dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi kedua. Hal ini karena ibu yang buta huruf cenderung kurang memiliki pengetahuan terhadap berbagai kebutuhan anak berusia dini, padahal usia dini merupakan masa *golden age* nya. Adapun kekurangan pengetahuan ini, jelas

akan sangat mempengaruhi perkembangan kesehatan, emosi, sosial, dan intelektual sang anak.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator bidang pendidikan, yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pada berbagai kelompok usia sekolah. Pemerintah berharap APS semua kelompok usia sekolah, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini karena peningkatannya itu menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang telah memperoleh layanan pendidikan.

Gambar 3.3.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2016-2021 (Persen)



Sumber : Susenas 2016-2021 (data diolah)

Berdasarkan data Susenas 2021, terlihat bahwa APS penduduk usia 7-18 tahun di Kota Tangerang Selatan selama setahun terakhir telah mengalami

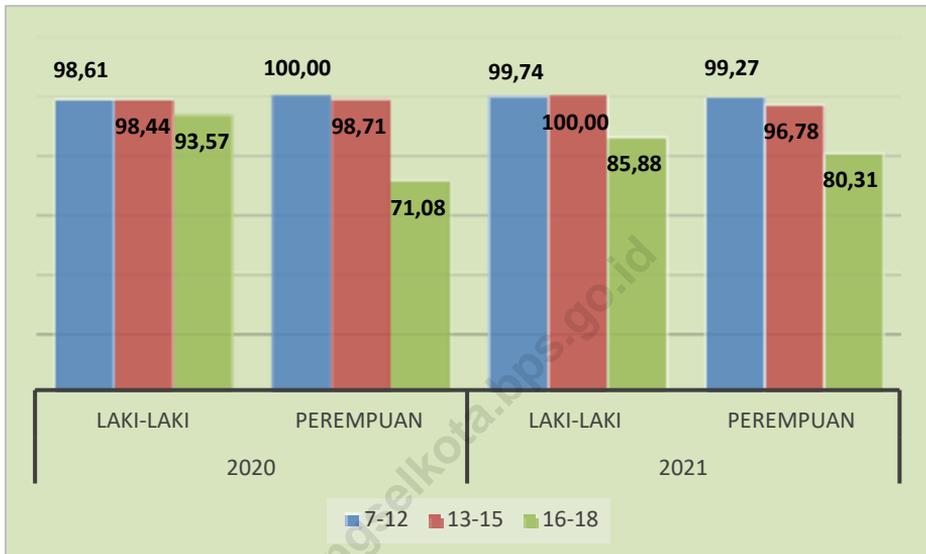
peningkatan (Gambar 3.3). Kondisi yang demikian menjadi penanda bagi meningkatnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Besar kemungkinan, peningkatan APS nya disebabkan oleh bertambahnya anggaran belanja pemerintah daerah terkait fungsi pendidikan. Dalam hal ini, biaya pendidikan SD dan SMP sudah ditanggung oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sementara untuk siswa-siswa SMA/SMK ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

APS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 berdasar kelompok umur, lebih tinggi untuk usia 7-12 dan 13-15 tahun. Usia ini setara dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan bangunan sekolah untuk jenjang pendidikan ini lebih merata dan mencukupi. Bahkan, untuk jenjang pendidikan SD telah tersedia sampai tingkat desa/kelurahan. Biaya pendidikannya, kebanyakan juga gratis sehingga masyarakat sangat mudah untuk mengaksesnya.

Sementara untuk usia 16-18 tahun atau jenjang pendidikan menengah, nilai APS nya lebih rendah dibanding kelompok usia yang lain. Hal ini dimungkinkan karena jumlah fasilitas untuk jenjang ini lebih sedikit. Di sisi lain, mereka yang berusia 16 tahun ke atas, secara legal formal memang sudah boleh bekerja. Oleh karena itu, banyak penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut, lebih memilih bekerja daripada bersekolah. Terlebih lagi, mereka yang berasal dari keluarga miskin, yang memang harus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.. Namun, secara keseluruhan APS usia 16-18 tahun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, APS usia 16-18 tahun sebanyak 82,99 persen. Implikasinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang juga berarti daya saing Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Kenaikan nilai APS di Kota Tangerang Selatan dimungkinkan karena semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan.

Gambar 3.4.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin
Tahun 2020 dan 2021 (Persen)



Sumber : Susenas 2020 dan 2021 (data diolah)

Pada tahun 2020 dan 2021, APS perempuan untuk seluruh kelompok usia sekolah terlihat hampir seimbang dengan laki-laki. Bahkan pada tahun 2020, pada usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun, APS perempuan justru lebih tinggi (Gambar 3.5). Selain itu, pada tahun 2021 APS untuk kelompok usia 16-18 tahun mengalami kenaikan. Kemungkinan, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan cara pandang di tengah masyarakat, dimana anak perempuan sudah dianggap sama pentingnya dengan anak laki-laki. Akibatnya, peluang seorang anak untuk bersekolah tidak lagi ditentukan berdasarkan gender, melainkan semata karena faktor kemampuan.

Meningkatnya APS perempuan ini dapat menjadi penanda bahwa di masa depan, kualitas SDM perempuan akan lebih baik. Bila diskriminasi gender suatu saat sudah tidak ada lagi di dunia kerja, akan jauh lebih banyak lagi perempuan

yang bekerja dibandingkan sekarang ini. Bahkan, ada kemungkinan proporsi perempuan yang bekerja melebihi laki-laki.

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dapat dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.1.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Distribusi Pengeluaran
Perkapita
Tahun 2019-2021

Ijazah yang dimiliki	40% bawah			40% menengah			20% atas		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak mempunyai ijazah	5,59	8,02	7,44	3,73	4,78	4,82	1,97	2,04	1,48
SD/ sederajat	20,84	18,30	17,67	10,23	13,60	12,70	3,43	5,07	3,81
SMP/ sederajat	19,18	22,42	23,50	17,11	18,27	16,75	9,31	13,22	11,23
SMA ke atas	54,39	51,26	51,40	68,89	63,35	65,73	85,29	79,67	83,48

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019-2021

Tabel 3.1 menyajikan komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB yang dimiliki atau tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan distribusi pengeluaran perkapita. Berdasarkan tabel tersebut terlihat

bahwa persentase penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke Atas mengalami peningkatan di semua kelompok distribusi pengeluaran perkapita dibanding dengan tahun 2020. Di kelompok 40% bawah, menunjukkan adanya peningkatan lulusan jenjang SMP/ sederajat dan SMA ke atas. Hal ini dapat dimungkinkan dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bahkan di masyarakat dengan ekonomi bawah.

Diamati menurut jenis kelamin (Tabel 3.2), terlihat bahwa meningkatnya proporsi penduduk tamatan SMA ke Atas, terjadi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2021, penduduk laki-laki yang lulusan SMA sederajat meningkat dari 66,46 persen menjadi 67,09 persen. Sementara untuk penduduk perempuan, meningkat dari 58,58 menjadi 61,57 persen.

Tabel 3.2.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
Tahun 2019-2021

Ijazah/STTB Tertinggi	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Tamat SD	3,27	3,83	3,84	4,78	6,89	6,27	4,02	5,36	5,05
SD/MI	11,05	11,35	12,33	14,1	15,54	12,87	12,58	13,44	12,6
SMP/MTs	14,25	18,36	16,73	18,1	18,99	19,30	16,17	18,67	18,01
SMA/MA/SMK	71,43	66,46	67,09	63	58,58	61,57	67,23	62,52	64,33

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019-2021

Sementara perbedaan besaran proporsi lulusannya, mencerminkan perbedaan kualitas SDM antara penduduk laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa kualitas SDM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena memiliki proporsi lulusan SMA ke Atas yang lebih banyak.

Kualitas Layanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi program utama pemerintah guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru merupakan jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.

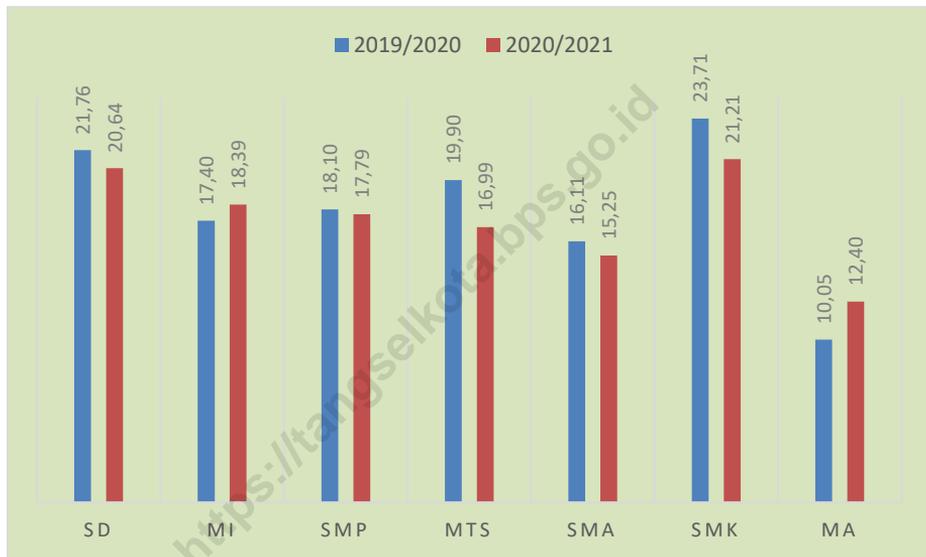
Semakin tinggi rasio murid-guru, akan semakin berkurang pengawasan/perhatian yang diberikan oleh guru terhadap murid, sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin rendah. Hal ini karena, semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru, dapat mengurangi daya tangkap murid terhadap pelajaran yang diberikan. Dengan kata lain, akan mengurangi efektivitas proses belajar mengajar.

Berdasarkan data yang ada pada Gambar 3.6, terlihat bahwa selama tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 telah terjadi penurunan rasio murid-guru di Kota Tangerang Selatan menurut jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, rasio murid-guru menurun dari 21,76 menjadi 20,64, jenjang pendidikan SMP dari 18,10 menjadi 17,79 dan jenjang pendidikan SMA dari 16,11 menjadi

15,25. Penurunan rasio murid-guru ini menjadi penanda adanya peningkatan dalam layanan pendidikan. Hal ini karena proses belajar mengajar pada berbagai jenjang pendidikan tersebut menjadi semakin efektif.

Gambar 3.5.

Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2019/2020-2020/2021



Sumber : Kota Tangerang Selatan dalam Angka

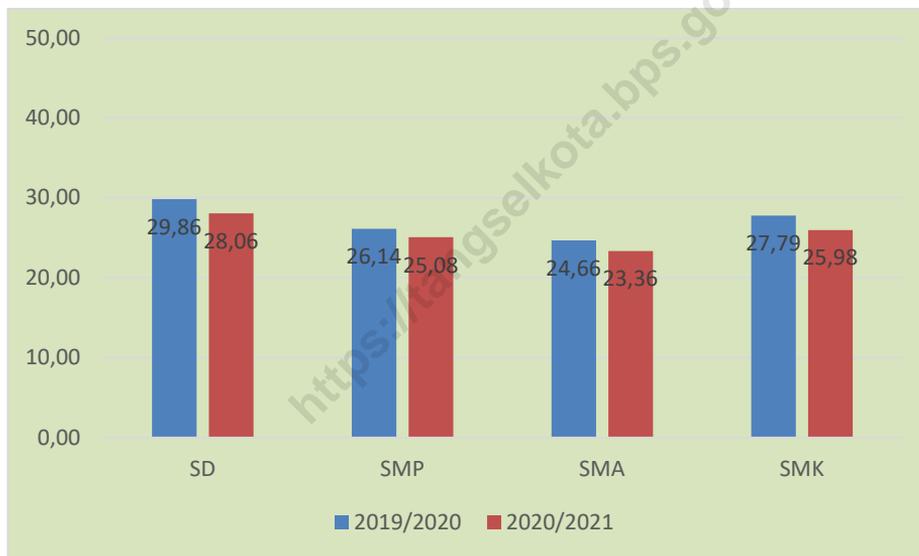
Indikator berikutnya adalah rasio murid per kelas. Rasio murid per kelas adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per kelas ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut sangat berlebih. Tingginya rasio murid per kelas juga akan memberikan dampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar.

Selama tahun ajaran 2020/2021, telah terjadi penurunan rasio murid per kelas

di Kota Tangerang Selatan menurut jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK (Gambar 3.7). Berarti, ada perbaikan dalam layanan pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Jumlah murid ideal untuk proses belajar mengajar yang maksimal hanya 25 murid per kelas. Untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA bisa dikatakan cukup ideal untuk jumlah murid per kelas. Sementara untuk jenjang SD, sedikit lebih tinggi dari jumlah ideal per kelas.

Gambar 3.6.

Rasio Murid per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2019/2020- 2020/2021



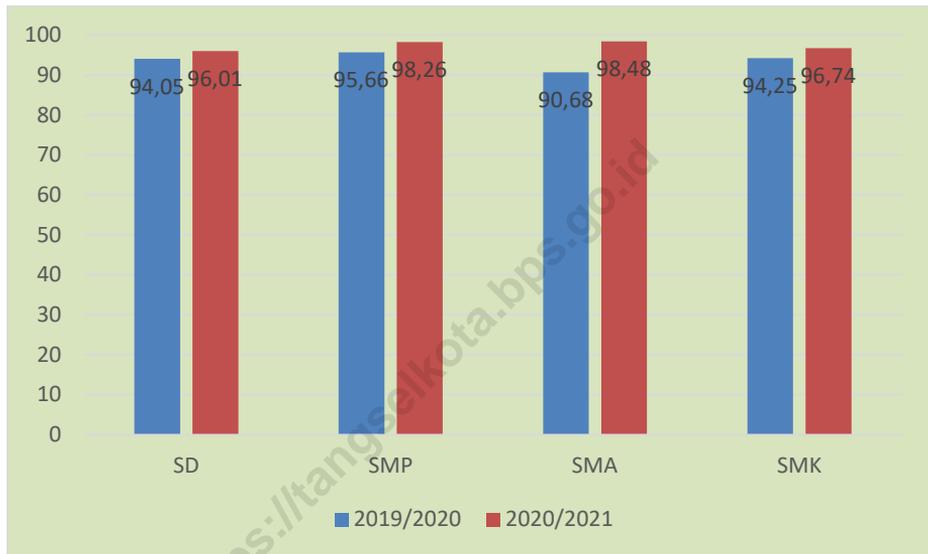
Sumber : Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2019/2020-2020/2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (data diolah)

Sementara itu guru yang profesional merupakan faktor penentu bagi proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Profesionalitas seorang guru dapat diketahui dari kemampuannya dalam menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa atau murid menjadi termotivasi

untuk lebih giat lagi mengikuti proses belajar mengajar.

Gambar 3.7.

Persentase Guru Berpendidikan Minimal DIV/S1
Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2019/2020-2020/2021



Sumber : Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2019/2020-2020/2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (data diolah)

Sebelum menjadi profesional, seorang guru harus terlebih dahulu berkualitas. Kualitas guru, setidaknya dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang disandangnya. Berdasarkan Gambar 3.8, di Kota Tangerang Selatan sebagian besar guru pada berbagai jenjang pendidikan sudah berpendidikan minimal D4/S1, bahkan dengan persentase yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas guru di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN



IV

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, cukup banyak permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian, diantisipasi dan diselesaikan oleh Pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya tingkat pengangguran, sedikitnya penciptaan lapangan kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya.

Bidang ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan pemerintah, dalam rangka pembangunan nasional dan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat, sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS merujuk kepada *The Labor Force Concept*, yang menjadi rekomendasi dari *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan

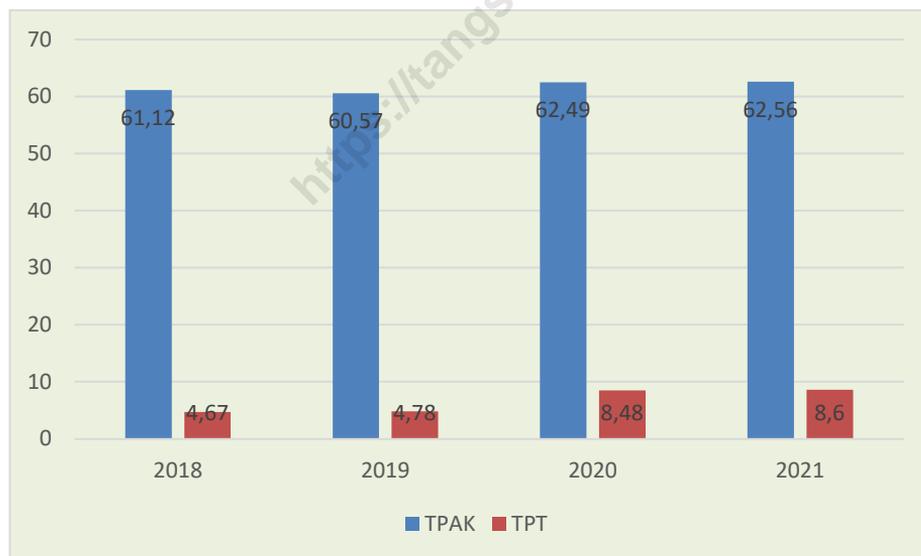
kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan mencari pekerjaan (pengangguran). Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja, yang tergolong sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Gambar 4.1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Agustus 2018-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten

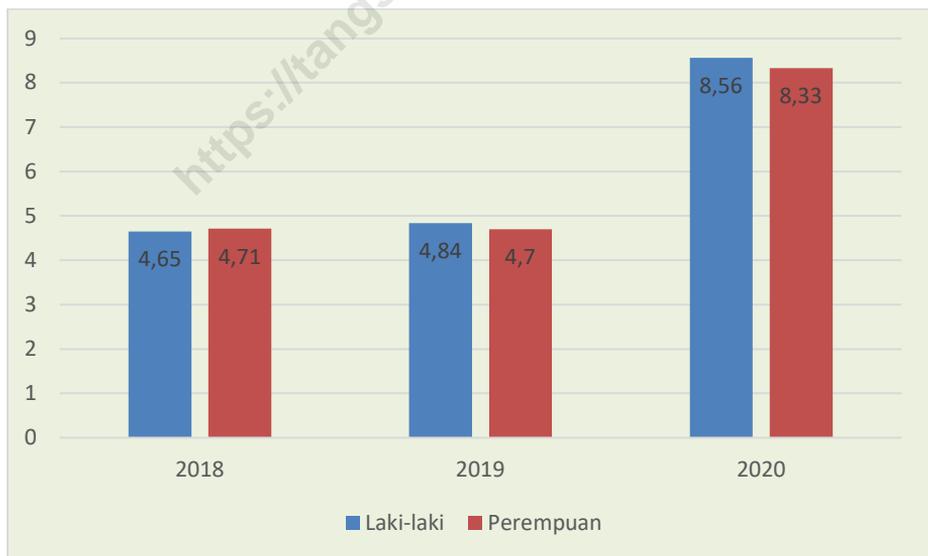
Berdasarkan Gambar 4.1, TPAK periode Agustus 2021 sebesar 62,56 persen,

berarti ada sekitar 63 orang dari 100 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Adapun sisanya, bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Dari sisi capaian, angka TPAK ini telah meningkat dibandingkan Agustus 2020.

Dari TPAK dapat diketahui besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, hanya dapat dilihat melalui tingkat pengangguran terbuka (TPT). Bagian yang tidak terserap oleh pasar ini selanjutnya disebut sebagai penganggur, yang timbul karena suplai tenaga kerja jauh melebihi permintaannya.

Gambar 4.2.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
Agustus 2018-2020 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten

Sementara penganggur atau pengangguran terbuka didefinisikan sebagai

orang yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Berbeda dengan TPAK, angka TPT Kota Tangerang Selatan selama setahun terakhir ini justru mengalami peningkatan (Tabel 4.1). Pada tahun 2021, TPT Kota Tangerang Selatan sebesar 8,6 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 8,48. Diamati menurut jenis kelamin, terlihat bahwa angka TPT perempuan lebih rendah dibandingkan TPT laki-laki. Pada tahun 2020, angka TPT baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam, hal ini dimungkinkan karena terkena dampak adanya pandemi covid-19. Sehingga banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan susahny mencari pekerjaan.

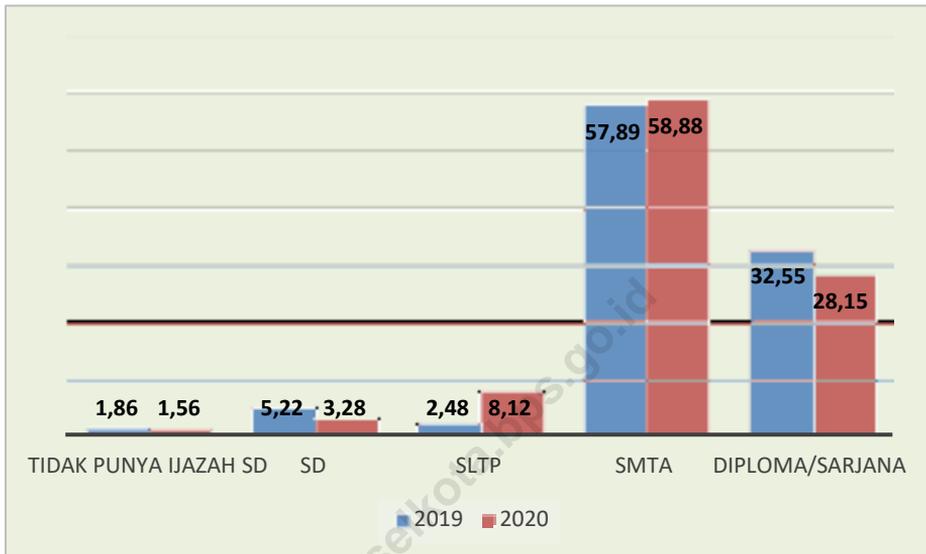
Tingkat Pengangguran dan Pendidikan

Pendidikan yang tinggi menjadi jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan berdampak kepada tingginya harapan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha, yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Gambar 4.1, menyajikan angka TPT menurut tingkat pendidikan angkatan kerja, yang dapat memberikan gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja pada masing-masing jenjang pendidikan. Terlihat bahwa pada Agustus 2020, angka TPT terjadi peningkatan pada jenjang pendidikan SLTP dan SMTA. Sementara untuk jenjang pendidikan yang lain, mengalami sedikit penurunan.

Gambar 4.3.

TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Agustus 2019-2020 (Persen)



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan 2019-2020

Diamati menurut besaran TPT nya, tingkat pengangguran terbuka penduduk berpendidikan SMP ke Bawah terlihat masih relatif rendah. Hal ini dapat terjadi karena angkatan kerja berpendidikan rendah memang bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja, termasuk bila dibayar dengan upah yang rendah sekalipun.

Sementara lulusan SMA Umum dan SMK, tingkat penganggurannya sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan karena dengan keahlian yang terbatas, mereka akan kalah bersaing dengan angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III dan Universitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan pencari kerja berpendidikan rendah, yang bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja.

Adapun lulusan diploma dan universitas, tingkat penganggurannya masih agak tinggi dibanding dengan jenjang pendidikan yang lain selain SMA. Hal

ini dimungkinkan karena mereka sepertinya memilih-milih pekerjaan, tentunya sesuai dengan tingkat pendidikan dan upah yang diharapkannya. Kondisi yang demikian setidaknya terlihat dari masih adanya penganggur di antara mereka.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pekerjaan utama merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi suatu lapangan usaha dalam penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran lapangan usaha mana saja yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Dengan demikian, bila pemerintah ingin menerapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, dapat fokus kepada lapangan-lapangan usaha tertentu, sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Tabel 4.1.

Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Agustus 2019-2020

Lapangan Usaha	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Industri Pengolahan	8,42	6,54
Konstruksi	6,04	6,89
Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi/Perawatan Mobil-Sepeda Motor	22,97	26,44
Transportasi dan Perdagangan	8,89	10,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,13	7,33
Informasi dan Komunikasi	2,84	3,99

Jasa Keuangan dan Asuransi	5,82	5,52
Real estate	3,02	2,74
Jasa Perusahaan	5,50	5,90
Administrasi pemerintahan	3,56	1,96
Jasa Pendidikan	6,05	6,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,89	2,10
Jasa Lainnya	12,11	11,75

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan 2019-2020

Berdasarkan Tabel 4.2, ada empat lapangan usaha yang sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan. Keempat lapangan usaha ini adalah lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi/perawatan mobil-sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan serta jasa lainnya. Dari keempat lapangan usaha ini, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yang penyerapan tenaga kerjanya mengalami penurunan. Hal ini merupakan salah satu dampak pandemi covid yang menyebabkan banyak usaha akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja. Meskipun menurun 2,8 persen poin dibandingkan Agustus 2019, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ternyata masih mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Adapun lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu konstruksi, transportasi dan perdagangan, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan. Sedangkan lapangan usaha real estate, administrasi pemerintahan dan jasa kesehatan mengalami penurunan. Menurunnya lapangan usaha real estate dimungkinkan karena semakin

naiknya harga perumahan di Kota Tangerang Selatan, sehingga menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun terlebih adanya dampak pandemi covid yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan.

Tabel 4.2.

Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Agustus 2019-2020

Status Pekerjaan Utama	2019			2020		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Formal						
Buruh/Karyawan/Pegawai	67,7 2	65,8 2	67,0 4	62,0 3	57,6 5	60,4 2
Berusaha dibantu buruh tetap	3,83	1,30	2,92	4,33	1,27	3,20
Informal						
Berusaha sendiri	21,2 6	22,8 3	21,8 3	24,4 9	23,0 6	23,9 7
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	2,91	3,32	3,06	2,67	4,82	3,46
Pekerja Bebas Pertanian/Non Pertanian	2,51	1,34	2,09	4,63	4,81	4,70
Pekerja Keluarga/ Pekerja Tidak Dibayar	1,76	5,39	3,07	1,85	8,39	4,26

Sumber : BPS Provinsi Banten

Selain berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja juga bisa diamati menurut status pekerjaan utamanya. Status pekerjaan utama ini,

selanjutnya digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun dua kelompok kegiatan ekonomi, yakni formal dan informal. Kegiatan ekonomi formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Adapun sisanya, digolongkan ke dalam kegiatan informal.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.3, terlihat bahwa mayoritas pekerja di Kota Tangerang Selatan bekerja pada sektor ekonomi formal. Terutama yang berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai. Hanya saja, persentasenya menurun dari 67,04 persen menjadi 60,42 pada Agustus 2020. Kondisi yang demikian menjadi penanda bagi melemahnya sektor ekonomi formal.

Melemahnya sektor ekonomi formal, terlihat lebih banyak dipengaruhi oleh turunnya persentase pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai (Tabel 4.3). Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh turunnya kegiatan atau kinerja usaha industri pengolahan, yang ditandai oleh menurunnya persentase pekerja pada lapangan usaha tersebut.

Sebaliknya, sektor ekonomi informal justru mengalami peningkatan. Penyebabnya, terutama adalah meningkatnya persentase penduduk yang berprofesi sebagai pengusaha mikro dan kecil (berusaha sendiri). Dimana, sebagian dari mereka sepertinya berasal dari buruh/karyawan/pegawai usaha industri pengolahan, yang tidak lagi bekerja pada lapangan usaha ini. Kegiatan ekonomi informal, berkembang pesat di daerah perkotaan termasuk Kota Tangerang Selatan.

Jumlah Jam Kerja

Dalam mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan pendekatan jumlah jam kerja. Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan asumsi bahwa semakin lama jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja, akan semakin banyak

jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, pekerjaanya akan semakin produktif.

Berdasarkan lama jam kerja pula, penduduk yang bekerja dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu sementara tidak bekerja, pekerjaan penuh, setengah penganggur, dan pekerja paruh waktu. Yang dimaksud sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja. Adapun pekerja penuh ialah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, dengan jumlah jam kerja minimal 35 jam.

Tabel 4.3.

Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja
Agustus 2019-2020

Kategori Pekerja	2019			2020		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerja Penuh	88,95	77,64	84,87	75,20	64,27	71,18
Setengah Penganggur	0,71	1,04	0,83	4,85	7,57	5,85
Pekerja Paruh Waktu	5,50	16,62	9,51	11,38	19,83	14,49
Pengangguran Terbuka	4,84	4,70	4,79	8,56	8,33	8,48

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan, 2020

Setengah menganggur dan pekerja paruh waktu, pada prinsipnya adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Hanya saja, setengah menganggur masih berusaha mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Sebaliknya pekerja paruh waktu, tidak lagi mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Tabel 4.3, menyajikan data persentase penduduk yang bekerja menurut kategorisasi lama jam kerja dan jenis kelamin. Terlihat bahwa persentase pekerja berkategori pekerja penuh menurun dari 84,87 persen menjadi 71,18 persen pada Agustus 2020. Penurunannya ini dengan sendirinya menaikkan persentase setengah penganggur dan yang sementara tidak bekerja. Selanjutnya, dengan mengasumsikan tingkat produktivitas bergantung kepada lamanya jam kerja, dapat dikatakan bahwa produktivitas pekerja di Kota Tangerang Selatan secara umum telah mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya persentase pekerja penuh.

Diamati menurut jenis kelamin, pekerja berkategori paruh waktu banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat dipahami, mengingat sebagian besar perempuan yang bekerja mempunyai peran ganda yaitu juga mengasuh anak. Sehingga mereka akan memilih pekerjaan yang tidak terlalu mengikat secara waktu.

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI





Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang memiliki pola konsumsi masing-masing, yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan pola konsumsi ini dipengaruhi oleh besar-kecilnya pendapatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, jenis pekerjaan, harga barang dan jasa, dan selera yang sedang berkembang di tengah masyarakat.

Pola konsumsi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini karena, kondisi tersebut akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada suatu kelompok masyarakat. Akibatnya, pola konsumsi antar kelompok masyarakat juga dapat berbeda.

Betapapun juga, dalam berkonsumsi, setiap orang atau masyarakat pada umumnya akan mendahulukan barang kebutuhan pokok, baru kemudian memenuhi kebutuhan lainnya.

Pengeluaran Penduduk

Pola konsumsi atau pengeluaran penduduk, secara garis besar dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Pola pengeluaran ini akan berubah, seiring dengan perubahan yang terjadi pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sedangkan pengeluaran bukan makanan akan meningkat.

Pergeseran pola pengeluaran tersebut, dapat terjadi karena elastisitas pendapatan terhadap makanan cukup rendah, sebaliknya terhadap bukan

makanan sangat tinggi. Oleh karena itu, kelebihan pendapatan akibat naiknya pendapatan ini, biasanya akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan, daripada untuk makanan.

Perubahan pola pengeluaran akibat naiknya pendapatan ini, sebenarnya sudah sejak lama diformulasikan dalam bentuk "Hukum Engel" oleh Ernst Engel (1821-1896). Menurut Engel, bila tidak ada perubahan selera maka dengan meningkatnya pendapatan, proporsi pengeluaran makanan akan menurun, sebaliknya proporsi pengeluaran bukan makanan akan meningkat.

Dengan demikian, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.1.

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan dan
Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan per Kapita
Maret 2016-2021



Sumber : BPS-Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi Maret 2016-2021 (data diolah)

Proporsi pengeluaran makanan rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan selama setahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari 39,56 persen pada Maret 2020 menjadi 39,33 persen pada Maret 2021. Selain itu, proporsinya juga lebih tinggi dibandingkan angka Maret 2016 (Gambar 5.1).

Menurunnya proporsi pengeluaran makanan tersebut, belum dapat menjadi petunjuk bagi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pada saat bersamaan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Tangerang Selatan meningkat dari 2,15 juta rupiah menjadi 2,34 juta rupiah pada Maret 2021. Selain itu, angka pengeluaran per kapitanya juga masih di atas rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Banten dan Nasional yang hanya 1,51 juta rupiah dan 1,26 juta rupiah.

Bila dilihat menurut kelompok pengeluaran (Tabel 5.1), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan pada sebagian besar sub kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada komoditas dalam sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, yang bertambah 110 ribu rupiah hingga mencapai 810 ribu rupiah pada Maret 2021. Adapun yang mengalami penurunan adalah komoditas makanan /minuman jadi, pakaian dan komoditas bukan makanan lainnya. Komoditas makanan/minuman jadi mengalami penurunan terbesar, yaitu turun sebesar 11 ribu rupiah hingga menjadi 336 ribu rupiah pada Maret 2021.

Diamati menurut proporsi pengeluarannya, terlihat ada sedikit pergeseran pada pola pengeluaran penduduk Kota Tangerang Selatan. Pada Maret 2019 dan 2020, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan, serta makanan/minuman jadi. Pada Maret 2021, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan dan aneka barang dan jasa.

Tabel 5.1.

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran
Maret 2019-2021

Kelompok Pengeluaran	Nominal (Rupiah)			Proporsi (Persen)		
	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Makanan	798.229	851.564	920.434	40,04	39,56	39,33
a. Bahan Makanan	391.913	429.009	506.286	19,66	19,93	21,64
b. Makanan/Minuman Jadi	338.269	347.279	336.220	16,97	16,13	14,37
c. Rokok	75.276	75.276	77.927	3,78	3,50	3,33
2. Bukan Makanan	1.195.311	1.301.186	1.419.645	59,96	60,44	60,67
a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	676.126	700.186	810.486	33,92	32,53	34,63
b. Aneka Barang dan Jasa	313.498	340.663	357.344	15,73	15,82	15,27
c. Pakaian	59.207	56.867	48.678	2,97	2,64	2,08
d. Barang Tahan Lama	43.051	67.357	67.370	2,16	3,13	2,88
e. Lainnya	103.429	136.113	135.768	5,19	6,32	5,80
3. Makanan+Bukan Makanan	1.993.540	2.152.750	2.340.079	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2019-2021

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein, merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang

dikonsumsi, dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam masing-masing makanan tersebut.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2.

Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Kota Tangerang Selatan Maret 2019-2021

Jenis Konsumsi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Kalori	2.121	2.082	2.122
B. Protein	68,16	66,44	66,03
1. Nabati	46,01	46,22	43,66
2. Hewani	22,15	20,66	22,37
a. Ikan	9,46	9,47	10,10
b. Daging	7,53	6,51	7,52
c. Telur dan susu	5,16	4,68	4,75

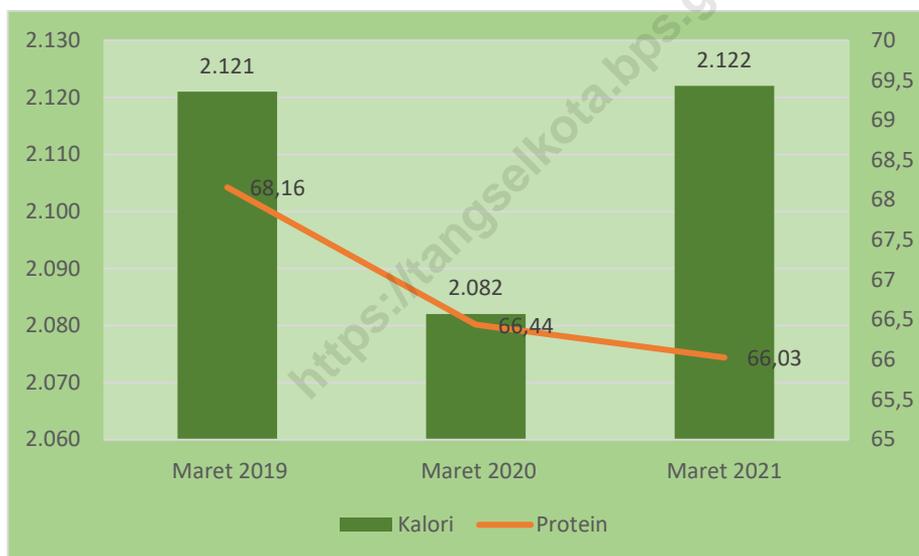
Sumber : BPS-Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi Maret 2019-2021

Tabel 5.2 menyajikan rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita sehari penduduk Kota Tangerang Selatan. Terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalorinya selama setahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari 2.082 kkal pada Maret 2020 menjadi 2.122 kkal pada Maret 2021. Angka konsumsi kalori ini masih berada di bawah batas kecukupan energi yang telah ditetapkan.

Adapun rata-rata konsumsi protein per kapita sehari penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan, dari 66,44 gram pada Maret 2020 menjadi sebesar 66,03 gram pada Maret 2021. Meskipun mengalami penurunan, angka konsumsi protein ini tetap melebihi batas kecukupan protein yang telah ditentukan, yang mencapai 57 gram per kapita sehari. Selain itu, rata-rata konsumsi protein tersebut juga sudah jauh berada di atas rata-rata Nasional yang sebanyak 62,28 gram.

Gambar 5.2.

Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari
Maret 2019-2020



Sumber : BPS-Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi Maret 2016-2020 (data diolah)

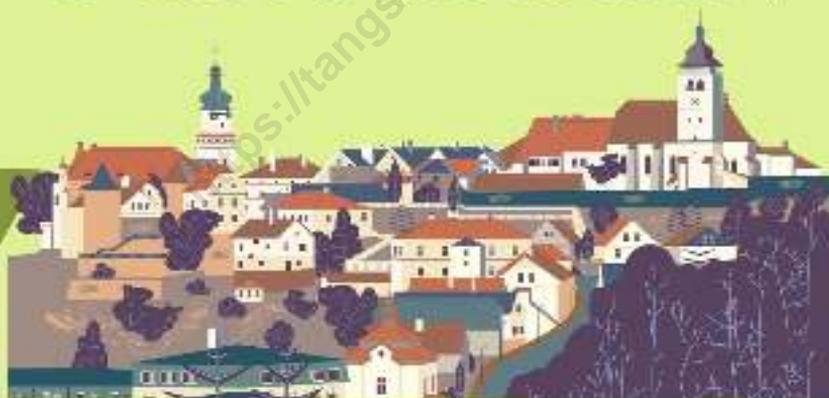
Berdasarkan naiknya rata-rata konsumsi kalori dan turunnya konsumsi protein per kapita sehari ini, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Namun, untuk konsumsi kalori belum mencapai batas kecukupan energi yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan RI pada tahun 2018. Untuk konsumsi protein

meskipun mengalami penurunan, namun masih melebihi batas kecukupan protein.

Menurunnya konsumsi protein per kapita sehari penduduk Kota Tangerang Selatan disebabkan oleh turunnya konsumsi protein nabati. Sementara itu konsumsi protein per kapita yang berasal dari hewani mengalami peningkatan menjadi 22,37 gram. Peningkatan konsumsi protein per kapita pada protein hewani disebabkan karena meningkatnya konsumsi ikan, daging maupun telur dan susu. Tingkat konsumsi ikan, daging, serta telur dan susu, per kapita sehari penduduk Tangerang Selatan berada di atas rata-rata Banten. Rata-rata konsumsi protein penduduk Tangerang Selatan untuk ketiga sumber protein ini, masing-masing mencapai 10,10 gram, 7,52 gram dan 4,75 gram per kapita sehari. Adapun untuk Banten, rata-rata hanya sebesar 9,9 gram, 5,4 gram dan 3,9 gram per kapita per hari.

BAB VI

PERUMAHAN





Perumahan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, setelah pangan dan sandang. Rumah berfungsi sebagai sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Oleh karena itu, rumah menjadi faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kreativitas kerja orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai bangunan yang selama jangka waktu tertentu dijadikan tempat tinggal. Adapun dalam arti khusus, istilah rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan, yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain (id.wikipedia.com).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992, mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah yang layak huni adalah rumah sehat, dalam hal ini harus memenuhi standar kesehatan, agar penghuni rumah dapat terjamin kesehatannya. Menurut Kemenkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: Pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis yang dalam hal ini adalah pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, serta terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.

Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga dapat menunjukkan status sosial pemiliknya. Hal ini karena, status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah yang dihuni atau dimilikinya. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang baik atau layak huni, pasti akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan kualitas rumah tinggal layak huni, yaitu jenis lantai rumah bukan dari tanah/lainnya, atap bukan dari ijuk/ lainnya dan dinding dari tembok, plesteran ayaman bambu/kawat atau kayu/ batang kayu.

Lantai rumah harus kuat untuk menahan beban di atasnya, tidak licin, stabil waktu dipijak, dan mudah dibersihkan. Bila musim hujan, lantai juga tidak boleh lembab, karena dapat menimbulkan gangguan/penyakit terhadap penghuninya. Agar tidak lembab, lantai rumah perlu dilapisi dengan lapisan yang kedap air, seperti marmer, keramik, ubin dan lapisan anti lembab lainnya. Dengan demikian, salah satu ciri rumah layak huni itu adalah bukan berlantai tanah/lainnya. BPS sendiri mengklasifikasikan lantai menjadi beberapa kategori yakni lantai marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah.

Tabel 6.1.

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021

Jenis Lantai Terluas	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmer/granit	2,34	3,64	2,46
Keramik	89,96	91,20	91,67
Parket/vinil/karpet	0,43	0,44	0,00
Ubin/tegel/teraso	3,81	0,74	3,95
Kayu/papan	0,09	0,23	0,22
Semen/bata merah	2,99	3,05	1,01
Bambu	0,05	0,00	0,19
Tanah	0,25	0,40	0,09
Lainnya	0,08	0,30	0,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan lantai tanah tercatat sebesar 0,09 persen. Turun dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 0,40 persen. Terlihat bahwa sebagian besar rumah

penduduk Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan lantai keramik yakni sebesar 91,67 persen. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan dari sisi lantai yang digunakan sudah cukup baik.

Selain lantai, atap rumah juga mempengaruhi kualitas rumah layak huni. Atap yang baik harus mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca, baik panas dan hujan maupun petir, angin, debu, dan sebagainya. Adapun atap yang layak menurut kriteria tersebut adalah atap yang terbuat bukan dari ijuk/lainnya.

Tabel 6.2.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021

Jenis Atap Terluas	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	3,62	2,22	2,30
Genteng	69,71	68,48	69,49
Seng	0,76	1,98	0,69
Asbes	25,07	27,23	27,03
Bambu	0,00	0,00	0,19
Kayu/Sirap	0,85	0,00	0,00
Jeramijuk/daun-daun/rumbia	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,09	0,30
Jumlah	100,01	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Dilihat dari sisi atap yang digunakan, kondisi perumahan di Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan telah memenuhi standar rumah layak huni yaitu memiliki rumah dengan atap terluas bukan dari ijuk/lainnya. Pada tahun 2021, 99,51 persen rumah di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan atap yang dianggap layak yakni terbuat dari genteng, asbes, beton dan seng.

Tabel 6.3.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas
di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019-2021

Jenis Dinding Terluas	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	97,35	98,23	98,90
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	1,09	0,51	0,42
Kayu/Papan	0,82	0,33	0,45
Anyaman Bambu	0,00	0,00	0,00
Batang Kayu	0,00	0,00	0,00
Bambu	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,74	0,92	0,24
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Selain lantai dan atap, dinding rumah juga turut mempengaruhi kualitas rumah layak huni. Dinding yang baik, harus tegak lurus agar dapat memikul berat dinding sendiri dan beban tekanan angin, serta mampu memikul beban di atasnya. Dinding harus dipisahkan dari pondasi, serta dilapisi oleh lapisan kedap air. Pelapisan ini dimaksudkan agar air tanah tidak meresap naik, sehingga dinding terhindar dari basah, lembab, tampak bersih dan tidak berlumut. Adapun jenis dinding yang layak menurut kriteria ini, hanyalah yang menggunakan tembok, plesteran anyaman bambu/kawat atau kayu/ batang kayu.

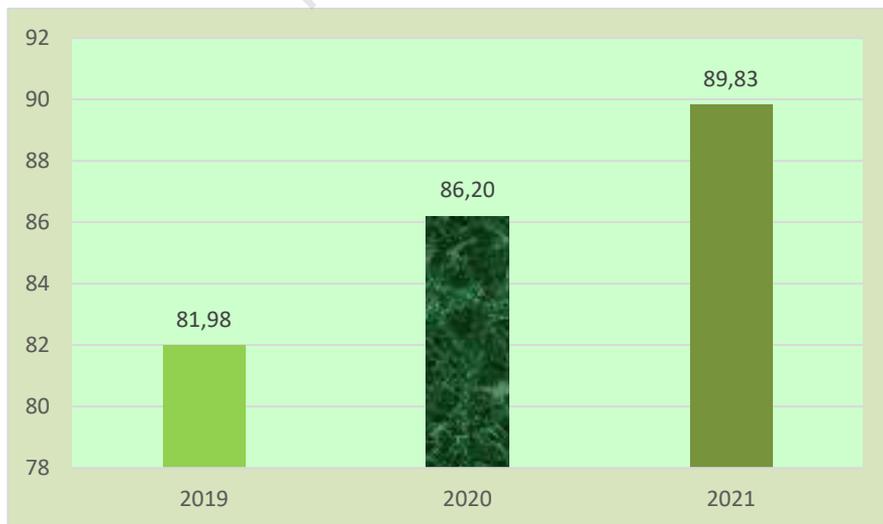
Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang menggunakan dinding tembok pada rumahnya adalah sebesar 98,90 persen. Sisanya masih berdindingkan kayu/papan, plesteran/anyaman bambu/kawat dan lainnya masing-masing sebesar 0,45 persen, 0,42 persen dan 0,24 persen.

Selain dilihat dari kualitas rumah, rumah yang layak huni atau rumah sehat harus mampu memberikan privasi kepada para penghuninya. Pemberian privasi ini didekati dengan luas lantai per kapita. Ada beberapa batasan minimal luas lantai per kapita, salah satunya dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan bahwa rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 meter persegi (BPS, 2001).

Menurut hasil Susenas yang disajikan pada Gambar 6.1 sebagian besar rumah tangga di Kota Tangerang Selatan terlihat sudah menempati rumah dengan ciri-ciri layak huni, yaitu memiliki luas lantai per kapita minimal 10 meter persegi. Selain itu, persentasenya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang hanya sebesar 81,98 persen dan 86,20 persen. Pada tahun 2021 rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita minimal 10 meter persegi sebesar 89,83 persen.

Gambar 6.1.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita Minimal 10 M² di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021



Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal yang lengkap, sudah tentu akan menambah kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam beraktifitas, serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas ini adalah tersedianya air minum bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. Termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak ke tempat penampungan kotoran tinja minimal 10 meter. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan sumber air minum bersih.

Jika dilihat lebih rinci, pada tahun 2019-2021 sumber air minum yang berasal dari air sumur bor/pompa merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Pada Tahun 2021 persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari sumur bor/pompa mencapai 48,17 persen. Sisanya sebanyak 28,83 persen menggunakan air kemasan bermerk, 20,28 persen menggunakan air isi ulang, 1,75 persen menggunakan air ledeng, 0,89 persen dari air sumur terlindung, dan 0,09 dari mata air terlindung sebagai sumber air minum.

Tabel 6.4.

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Untuk minum di Kota Tangerang Selatan, tahun 2019-2021

Fasilitas Air Minum Utama	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan Bermerek	38.35	31.46	28,83
Air Isi Ulang	16.04	20.37	20,28
Leding	0.71	0.05	1,75
Sumur Bor/Pompa	41.91	47.34	48,17
Sumur Terlindung	2.85	0.78	0,89
Sumur Tak Terlindung	0.13	0.00	0,00
Mata Air Terlindung	0.00	0.00	0,09
Mata Air Tak Terlindung	0.00	0.00	0,00
Air Permukaan	0.00	0.00	0,00
Air Hujan	0.00	0.00	0,00
Lainnya	0.00	0.00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketersediaan tempat buang air besar sendiri. Selain itu, ada pula akses terhadap sanitasi layak, yang didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, dan menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran atau tinja.

Tabel 6.5.

Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	96,58	96,70	98,02
Bersama	2,32	2,74	1,79
MCK Komunal	0,00	0,17	0,10
MCK Umum	0,00	0,39	0,00
Ada, ART Tidak Menggunakan	1,02	0,00	0,00
Tidak Ada	0,00	0,00	0,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019-2021

Berdasarkan hasil Susenas (Tabel 6.5), rumah tangga di Kota Tangerang Selatan pada umumnya sudah memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri mencapai 98,02 persen pada tahun 2021. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 dan 2020 rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri hanya sebanyak 96,58 persen dan 96,70 persen.

Fasilitas Penerangan

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Pada Tabel 6.7 menunjukkan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan yang digunakan di Kota Tangerang Selatan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah

menikmati fasilitas penerangan listrik. Sebanyak 91,53 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan menggunakan listrik PLN dengan meteran, 8,06 persen menggunakan listrik tanpa meteran dan sisanya sebanyak 0,41 persen menggunakan listrik non PLN.

Tabel 6.6.

Persentase rumah tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2019-2021

Sumber Penerangan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN dengan meteran	93,90	95,58	91,53
Listrik PLN tanpa meteran	5,56	4,11	8,06
Listrik Non PLN	0,55	0,30	0,41
Bukan Listrik	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	99,99	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Hal ini karena, kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya (rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya). Adapun rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.7.

Persentase Rumah tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021

Status Kepemilikan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	75,76	75,77	76,14
Kontrak/Sewa	17,54	16,66	19,72
Bebas Sewa	4,67	7,37	3,71
Dinas	1,01	0,20	0,42
Lainnya	1,03	0,00	0,00
Jumlah	100,01	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019-2021

Berdasarkan hasil Susenas 2019-2021, rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sebagian besar telah menempati rumah milik sendiri. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri pada tahun 2021 mencapai 76,14 persen, sementara menempati rumah kontrak/sewa sebesar 19,72 persen, menempati rumah bebas sewa sebesar 3,71 persen, dan sisanya sebesar 0,42 persen menempati rumah dinas.

BAB VII

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN





Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan masih menjadi masalah kronis di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kemiskinan yang sebelumnya menjadi tujuan utama agenda pembangunan “*Millennium Development Goals*” (MDGs), kembali menjadi tujuan utama dalam “*Sustainable Development Goals*” (SDGs). Terkait kemiskinan ini, SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk di wilayah manapun pada tahun 2030.

Kemiskinan di Indonesia juga selalu menjadi prioritas pemerintah, sehingga menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat turun menjadi 6%—7% pada 2024 dari angka *baseline* 9,45% pada 2019.

Adapun program-program intervensi yang dilaksanakan saat ini menurut Presiden Joko Widodo (Kemenkeu, 2020), meliputi program pengurangan beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.

Disamping itu, dari sisi pemberdayaan *income generating* untuk warga miskin, ada Kredit Untuk Rakyat (KUR), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, dan Ultra Mikro (UMI). Bahkan ada pula, program pengentasan kemiskinan lewat BUMN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) swasta.

Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah. Hal ini karena, kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut antara lain mencakup garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P_0), indeks kedalaman kemiskinan (P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan indikator target pencapaian, serta bahan untuk evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas bulan Maret.

Perkembangan Garis Kemiskinan

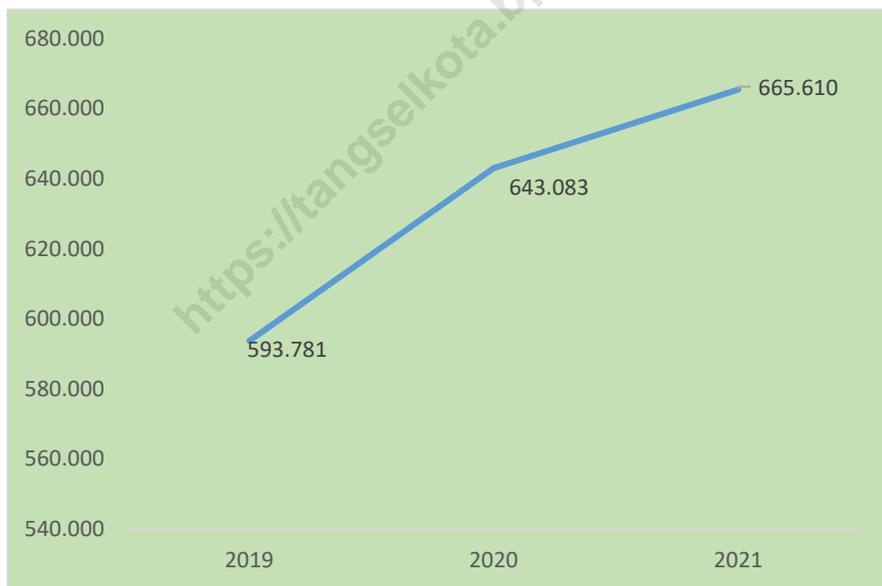
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, dihitung berdasarkan 52 komoditi kebutuhan dasar makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Adapun garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai pengeluaran atau kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang dihitung berdasarkan 36 komoditi kebutuhan dasar bukan makanan. Adapun penduduk miskinnya, didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan Kota Tangerang

Selatan mencapai 593.781 rupiah per kapita sebulan, kemudian secara bertahap meningkat mencapai 643.083 rupiah per kapita sebulan pada 2020, dan 665.610 rupiah per kapita sebulan pada 2021. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Grafik 7.1.

Garis Kemiskinan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019-2021
(Rupiah per Kapita Sebulan)



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019-2021

Perkembangan Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 mencapai 2,57 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,29 persen. Bahkan, angka

kemiskinan tahun 2021 ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2010.

Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 sebanyak 44,57 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dan 2019 yang hanya sebanyak 40,99 ribu jiwa dan 29,16 ribu jiwa. Malahan jumlah penduduk miskin tahun 2021 ini juga yang tertinggi sejak tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang selatan pada tahun 2021 dan 2020 disebabkan karena lambatnya laju roda perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Tabel 7.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Jiwa	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2019	29,16	1,68
2020	40,99	2,29
2021	44,57	2,57

Sumber : BPS Provinsi Banten

Tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan merupakan terendah kedua secara nasional setelah Kota Sawah Lunto yaitu sebesar 2,38 persen. Untuk wilayah Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah sebelum kota Depok yang tingkat kemiskinannya sebesar 2,58 persen.

Rendahnya tingkat kemiskinan ini, bukan berarti masalah kemiskinan tidak lagi

menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan, bukan hanya sekadar mengukur berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, selain menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan digunakan indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P_1). P_1 , akan melihat rata-rata jarak pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai P_1 , semakin jauh jaraknya terhadap garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P_2), adalah indikator untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan. P_2 , dapat menunjukkan sebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P_2 , semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. P_1 dan P_2 dapat menunjukkan kualitas dari kemiskinan di suatu daerah.

Tabel 7.2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Maret 2019-2021

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
2019	0,27	0,07
2020	0,31	0,08
2021	0,34	0,07

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 7.2, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 0,34, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilai indeks kedalaman kemiskinannya sebesar 0,31. Adapun, indeks keparahan kemiskinan ternyata mengalami penurunan dari 0,08 pada tahun 2020 menjadi 0,07 pada tahun 2021.

Meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2020-2021, menjadi penanda bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin pada periode tersebut semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan untuk tingkat kesenjangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskinnya semakin rendah, hal ini yang ditandai dengan turunnya nilai indeks keparahan kemiskinan. Dengan kata lain sebaran penduduk miskin lebih homogen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://tangselkota.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Alodokter, 2018. Keluarga. Retrieved from Alodokter.com:
<https://www.alodokter.com/pentingnya-inisiasi-menysui-dini-untuk-kesehatan-bayi>
- Balitbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta
- BBC Indonesia. 2008. Indonesian. Retrieved from Bbc.co.uk:
http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/04/printable/080423_pregnancy.shtml
- BPS Provinsi Banten. 2015. *Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2010-2020*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2017. *Proyeksi Penduduk Provinsi Banten 2015-2025*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2020a. *Statistik Daerah Provinsi Banten 2020*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2019*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang
- BPS Provinsi Banten. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2020*. BPS Provinsi Banten: Kota Serang

- BPS Kota Tangerang Selatan. 2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2016. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2017. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2018. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2019. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2020. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2019. Keadaan Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan Agustus 2019. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan Agustus 2020. BPS Kota Tangerang Selatan: Kota Tangerang Selatan
- Kemenkeu Ri. 2020. Berita. Retrieved From [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id)
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-minta-pengentasan-kemiskinan-terkonsolidasi-terintegrasi-dan-tepat-sasaran/>

LAMPIRAN

<https://tangselkota.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021

Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	62.407	60.891	123.298
5-9	70.694	70.303	140.997
10-14	62.663	63.518	126.181
15-19	60.671	65.635	126.306
20-24	69.003	70.418	139.421
25-29	71.542	77.928	149.470
30-34	77.691	73.574	151.265
35-39	76.811	76.353	153.164
40-44	73.157	73.849	147.006
45-49	69.501	64.914	134.415
50-54	57.012	55.867	112.879
55-59	51.141	47.413	98.554
60-64	32.198	30.510	62.708
65-69	20.792	13.837	34.629
70-74	10.259	10.905	21.164
75+	9.816	12.188	22.004
Total	875.358	868.103	1.743.461

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025

Lampiran 2.

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Banten 2016-2021

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Pandeglang	0,54	0,49	0,45	0,40	0,36	0,32
Kab. Lebak	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,41
Kab.Tangerang	2,32	2,28	2,23	2,19	2,14	2,10
Kab. Serang	0,56	0,52	0,47	0,43	0,38	0,34
Kota Tangerang	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,63
Kota Cilegon	1,47	1,43	1,38	1,34	1,29	1,25
Kota Serang	1,71	1,66	1,62	1,57	1,52	1,48
Kota Tangsel	2,16	2,11	2,06	2,02	1,97	1,93
Provinsi Banten	1,58	1,54	1,50	1,46	1,42	1,39

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025

<https://ranyselatan.bps.go.id/>

Lampiran 3.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2021

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	118.938	119.725	120.508	121.281
5-9	135.459	136.612	137.614	138.524
10-14	120.732	121.397	122.211	123.139
15-19	122.713	123.240	123.793	124.329
20-24	134.649	135.811	136.861	137.777
25-29	141.748	143.027	144.211	145.471
30-34	140.630	142.945	145.012	146.849
35-39	138.364	140.652	143.098	145.601
40-44	130.350	133.498	136.557	139.296
45-49	110.632	115.246	119.617	123.896
50-54	86.993	91.047	95.157	99.217
55-59	71.559	75.780	80.154	84.829
60-64	42.643	45.847	49.150	52.467
65-69	22.809	24.310	25.940	27.757
70-75	12.515	13.933	15.457	17.075
75+	13.601	14.557	15.580	16.669
JUMLAH	1.544.335	1.577.627	1.610.920	1.644.177

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025

Lanjutan Lampiran 3.

Kelompok Umur	2019	2020	2021
(1)	(6)	(7)	(8)
0-4	121.979	122.801	123.298
5-9	139.466	140.061	140.997
10-14	124.055	125.078	126.181
15-19	124.948	125.602	126.306
20-24	138.410	138.990	139.421
25-29	146.794	148.147	149.470
30-34	148.518	149.930	151.265
35-39	148.087	150.713	153.164
40-44	141.983	144.470	147.006
45-49	127.858	131.196	134.415
50-54	103.488	108.272	112.879
55-59	89.471	94.086	98.554
60-64	55.774	59.126	62.708
65-69	29.845	32.141	34.629
70-75	18.438	19.819	21.164
75+	18.249	20.007	22.004
JUMLAH	1.677.363	1.710.439	1.743.461

Sumber : Proyeksi Penduduk Banten 2015-2025

Lampiran 4.

Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Miskin (rupiah/kapita/bulan)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Pandeglang	267.752	285.822	310.859	326.517	361.712	390.754
Kab Lebak	246.389	261.880	283.901	298.201	334.509	358.479
Kab Tangerang	405.902	423.486	451.325	476.636	520.741	545.065
Kab Serang	256.660	269.652	294.829	309.036	341.074	362.102
Kota Tangerang	496.349	508.551	556.782	584.318	632.835	655.061
Kota Cilegon	347.949	373.147	428.867	459.469	504.571	540.032
Kota Serang	281.926	296.819	350.237	379.641	411.595	431.210
Kota Tangerang Selatan	472.968	494.784	549.150	593.781	643.083	665.610
Provinsi Banten	367.949	386.753	431.069	462.726	361.712	530.610

Sumber: BPS Provinsi Banten-Diolah dari Hasil Susenas 2016-2021

Lampiran 5.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Pandeglang	115,90	117,31	116,16	114,09	120,44	131,43
Kab Lebak	111,21	111,08	108,81	107,93	120,83	134,75
Kab Tangerang	182,52	191,62	190,05	193,97	242,16	272,35
Kab Serang	67,92	69,10	64,46	61,54	74,80	83,09
Kota Tangerang	102,88	105,34	103,49	98,37	118,22	134,24
Kota Cilegon	14,90	14,89	13,96	13,20	16,31	18,89
Kota Serang	36,40	36,97	36,21	36,21	42,24	47,91
Kota Tangerang Selatan	26,38	28,73	28,21	29,16	40,99	44,57
Provinsi Banten	658,11	675,04	661,36	654,46	775,99	867,23

Sumber: BPS Provinsi Banten-Diolah dari Hasil Susenas 2016-2021

Lampiran 6.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten
Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Pandeglang	9,67	9,74	9,61	9,42	9,92	10,72
Kab Lebak	8,71	8,64	8,41	8,3	9,24	10,29
Kab Tangerang	5,29	5,39	5,18	5,14	6,23	7,12
Kab Serang	4,58	4,63	4,3	4,08	4,94	5,49
Kota Tangerang	4,94	4,95	4,76	4,43	5,22	5,93
Kota Cilegon	3,57	3,52	3,25	3,03	3,69	4,24
Kota Serang	5,58	5,57	5,36	5,28	6,06	6,79
Kota Tangerang Selatan	1,67	1,76	1,68	1,68	2,29	2,57
Provinsi Banten	5,42	5,45	5,24	5,09	5,92	6,66

Sumber: BPS Provinsi Banten-Diolah dari Hasil Susenas 2016-2021

Lampiran 7.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016		2017		2018	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Pandeglang	1,23	0,24	1,25	0,25	1,31	0,29
Kab Lebak	1,14	0,21	0,99	0,22	1,26	0,29
Kab Tangerang	0,79	0,18	0,68	0,13	0,82	0,20
Kab Serang	0,43	0,05	0,79	0,19	0,80	0,22
Kota Tangerang	0,50	0,10	0,70	0,17	0,84	0,24
Kota Cilegon	0,52	0,13	0,59	0,15	0,59	0,18
Kota Serang	0,58	0,11	0,75	0,16	0,60	0,10
Kota Tangerang Selatan	0,28	0,08	0,30	0,07	0,22	0,05
Provinsi Banten	0,80	0,17	0,86	0,19	0,82	0,20

Sumber: BPS Provinsi Banten-Diolah dari Hasil Susenas 2016-2021

Lanjutan Lampiran 7.

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Pandeglang	1,33	0,28	1,00	0,16	1,49	0,33
Kab Lebak	0,97	0,21	1,14	0,24	1,66	0,40
Kab Tangerang	0,69	0,14	0,95	0,22	1,21	0,29
Kab Serang	0,65	0,16	0,40	0,05	0,61	0,12
Kota Tangerang	0,64	0,15	0,74	0,15	1,08	0,27
Kota Cilegon	0,34	0,07	0,39	0,06	0,50	0,11
Kota Serang	0,51	0,11	0,57	0,10	0,92	0,22
Kota Tangerang Selatan	0,27	0,07	0,31	0,08	0,34	0,07
Provinsi Banten	0,76	0,18	1,00	0,23	1,09	0,26

Sumber: BPS Provinsi Banten-Diolah dari Hasil Susenas 2016-2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://tangselkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANGERANG SELATAN**